

Sehingga dengan kata lain utang yang diwajibkan diberikan kepada orang yang tidak membutuhkannya, maka menurut analisis penulis, utang yang diberikan tersebut hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat dan rukun *qard* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

2. Pembayaran utang

Pengembalian dari utang tersebut wajib dilebihkan sesuai prosentase yang ditentukan. Dari prosentase tersebut, setiap orang berbeda-beda tergantung kondisi ekonominya. Minimal prosentasi yang ditentukan sekitar 0,5%. Dan paling tinggi prosentase yang ditentukan sekitar 3,5%. Hal ini yang dipermasalahkan dan menjadi acuan penulis untuk meneliti hal ini serta menyimpulkannya sesuai dengan aturan hukum Islam pada umumnya.

Dari segi hukum Islam, utang diperbolehkan dan tidak dijadikan permasalahan. Alasannya, karena utang dapat membantu seseorang yang terhimpit ekonomi dan mempermudah mereka yang membutuhkan dana, hal ini didasari oleh sifat agama Islam yakni membantu sesama dalam hal apapun selama hal tersebut tidak melanggar dari aturan hukum Islam. Akan tetapi utang baru dipermasalahkan jika tidak sesuai dengan syarat atau rukunnya serta dalam pengembaliannya dilebihkan tidak sesuai aturan. Umumnya pengembalian utang yang biasa dilebihkan hanya sebatas ucapan terima kasih, dan penambahan tersebut biasanya diberikan seikhlasnya oleh orang yang berutang tanpa ada syarat yang menuntut.

Makna hadis-hadis di atas yakni siapapun orang yang melakukan perbuatan riba baik itu sebagai perantara, ataupun hanya sekedar mengahutainya maka mereka tetap berdosa dan mendapatkan balasan kelak. Serta apapun yang terdapat penambahan dalam pembayaran yang tidak terjadi kesepakatan atau kesukarelaan antar para pihak, maka penambahan tersebut disebut riba.

Sama halnya seperti dalam arisan ini, jika dalam arisan tersebut penambahan pengembalian utang yang ditentukan tersebut tidak dihapuskan maka dampaknya sama seperti hadis di atas.

Merujuk kepada Alquran, hadis serta pendapat ulama Syafi'i di atas dapat disimpulkan, bahwa penambahan tersebut hendaknya ditiadakan, karena jika tetap diadakan penambahan pengembalian tersebut maka penambahan menjadi *gharar* dan hukum arisan tersebut menjadi haram hukumnya karena terdapat unsur riba dalam arisan tersebut. Dan pada dasarnya riba adalah haram hukumnya apapun jenisnya. Dan jika dalam arisan tersebut terdapat riba maka arisan tersebut haram hukumnya.